

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL

KERANGKA KONSEPTUAL
AKUNTANSI PEMERINTAHAN

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DESEMBER 2008

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN-----	1-5
Tujuan -----	1-3
Ruang Lingkup -----	4-5
LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN -----	6-15
Bentuk Umum Pemerintahan dan Pemisahan Kekuasaan -----	8-9
Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer Pendapatan antar Pemerintah -----	10
Pengaruh Proses Politik -----	11
Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah -----	12
Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan Alat Pengendalian -----	13
Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan Pendapatan -----	14
Kemungkinan Penggunaan Akuntansi Dana untuk Tujuan Pengendalian -----	15
PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI -----	16-19
Pengguna Laporan Keuangan -----	16
Kebutuhan Informasi -----	17-19
ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN-----	20-22
PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN -----	23-26
Peranan Pelaporan Keuangan-----	23-24
Tujuan Pelaporan Keuangan -----	25-26
KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN -----	27-28
DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN -----	29
ASUMSI DASAR -----	30-33
Kemandirian Entitas -----	31
Kesinambungan Entitas -----	32
Keterukuran dalam Satuan Uang (Monetary Measurement)-----	33
KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN -----	34-39
Relevan -----	35-36
Andal -----	37
Dapat Dibandingkan -----	38
Dapat Dipahami -----	39
PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN -----	40-54
Basis Akuntansi -----	41-44
Nilai Historis (Historical Cost) -----	45-46
Realisasi (Realization) -----	47-48
Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form)-----	49
Periodisitas (Periodicity) -----	50

Konsistensi (Consistency)-----	51
Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure)-----	52
Penyajian Wajar (Fair Presentation) -----	53-54
KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL -----	55-58
Materialitas -----	56
Pertimbangan Biaya dan Manfaat-----	57
Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif-----	58
UNSUR LAPORAN KEUANGAN -----	59-82
Laporan Realisasi Anggaran-----	60-61
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih -----	62
Neraca-----	63-74
Aset -----	65-71
Kewajiban -----	72-75
Ekuitas Dana -----	76
Laporan Operasional -----	77-78
Laporan Arus Kas-----	79-80
Laporan Perubahan Ekuitas -----	81
Catatan atas Laporan Keuangan -----	82
PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN -----	83-96
Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi -----	86
Keandalan Pengukuran -----	87-88
Pengakuan Aset -----	89-91
Pengakuan Kewajiban-----	92-93
Pengakuan Pendapatan -----	94
Pengakuan Beban dan Belanja -----	95-96
PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN -----	97-98

1 PENDAHULUAN

2 Tujuan

3 1. Kerangka Konseptual ini merumuskan konsep yang mendasari
4 penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
5 Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:

- 6 (a) penyusun standar akuntansi pemerintahan dalam melaksanakan
7 tugasnya;
- 8 (b) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi
9 yang belum diatur dalam standar;
- 10 (c) pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan
11 keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan; dan
- 12 (d) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang
13 disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar
14 akuntansi pemerintahan.

15 2. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal
16 terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi
17 pemerintahan.

18 3. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual
19 dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif
20 terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian
21 diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan standar
22 akuntansi di masa depan.

23 Ruang Lingkup

24 4. Kerangka konseptual ini membahas:

- 25 (a) tujuan kerangka konseptual;
- 26 (b) lingkungan akuntansi pemerintahan;
- 27 (c) pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
- 28 (d) entitas akuntansi dan pelaporan;
- 29 (e) peranan dan tujuan pelaporan keuangan, serta dasar hukum;
- 30 (f) asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat
31 informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala
32 informasi akuntansi; dan
- 33 (g) definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk
34 laporan keuangan.

1 5. Kerangka konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan
2 pemerintah pusat dan daerah.

3 LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN

4 6. Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh
5 terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.

6 7. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu
7 dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan
8 keuangan adalah sebagai berikut:

9 (a) Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:

- 10 (1) bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan;
11 (2) sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar
12 pemerintah;
13 (3) pengaruh proses politik;
14 (4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan
15 pemerintah.

16 (b) Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian:

- 17 (1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan
18 sebagai alat pengendalian;
19 (2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan
20 pendapatan;
21 (3) kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan
22 pengendalian; dan
23 (4) Penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena
24 digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan.

25 Bentuk Umum Pemerintahan dan Pemisahan 26 Kekuasaan

27 8. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazas
28 demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat mendelegasikan
29 kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan
30 pendelegasian kekuasaan ini terdapat pemisahan wewenang di antara
31 eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi
32 dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan
33 kekuasaan di antara penyelenggara negara.

34 9. Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan
35 pemerintahan, pihak eksekutif menyusun anggaran dan menyampaikannya
36 kepada pihak legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat

1 persetujuan, pihak eksekutif melaksanakannya dalam batas-batas apropriasi
2 dan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan apropriasi
3 tersebut. Pihak eksekutif bertanggung jawab atas penyelenggaraan
4 keuangan tersebut kepada pihak legislatif dan rakyat.

5 Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer 6 Pendapatan antar Pemerintah

7 10. Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam
8 sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat,
9 pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang
10 lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang
11 cakupannya lebih sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan
12 pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan
13 diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau
14 subsidi antar entitas pemerintahan.

15 Pengaruh Proses Politik

16 11. Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan
17 kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah berupaya
18 untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan
19 kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan
20 sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu
21 ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah
22 berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan
23 yang ada di masyarakat.

24 Hubungan antara Pembayaran Pajak dan 25 Pelayanan Pemerintah

26 12. Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah memungut
27 secara langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebagian
28 besar pendapatan pemerintah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka
29 memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut
30 tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah
31 kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh
32 pemerintah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan
33 dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:

- 34 (a) Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang
35 sifatnya suka rela.
- 36 (b) Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak
37 sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti

- 1 penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai
2 tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.
- 3 (c) Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah dibandingkan dengan
4 pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar
5 diukur sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh pemerintah.
6 Dengan dibukanya kesempatan kepada pihak lain untuk
7 menyelenggarakan pelayanan yang biasanya dilakukan pemerintah,
8 seperti layanan pendidikan dan kesehatan, pengukuran efisiensi
9 pelayanan oleh pemerintah menjadi lebih mudah.
- 10 (d) Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan
11 pemerintah adalah relatif sulit.

12 Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, 13 Target Fiskal, dan Alat Pengendalian

14 13. Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil
15 kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan
16 untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan
17 untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan
18 bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian,
19 anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi
20 landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh
21 pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode
22 tahunan. Namun, tidak tertutup kemungkinan disiapkannya anggaran untuk
23 jangka waktu lebih atau kurang dari setahun. Dengan demikian, fungsi
24 anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam
25 akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena:

- 26 (a) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
- 27 (b) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan
28 keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang
29 diinginkan.
- 30 (c) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi
31 hukum.
- 32 (d) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah.
- 33 (e) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan
34 pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah
35 kepada publik.

1 Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan 2 Pendapatan

3 14. Pemerintah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk
4 aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah,
5 seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi.
6 Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama
7 sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan
8 untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian,
9 fungsi aset dimaksud bagi pemerintah berbeda dengan fungsinya bagi
10 organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan
11 pendapatan secara langsung bagi pemerintah, bahkan menimbulkan
12 komitmen pemerintah untuk memeliharanya di masa mendatang.

13 Kemungkinan Penggunaan Akuntansi Dana untuk 14 Tujuan Pengendalian

15 15. Akuntansi dana (*fund accounting*) merupakan sistem akuntansi
16 dan pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan pemerintah
17 yang memisahkan kelompok dana menurut tujuannya, sehingga masing-
18 masing merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan
19 keseimbangan antara belanja dan pendapatan atau transfer yang diterima.
20 Akuntansi dana dapat diterapkan untuk tujuan pengendalian masing-masing
21 kelompok dana selain kelompok dana umum (*the general fund*) sehingga
22 perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pelaporan keuangan
23 pemerintah.

24 PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI

25 Pengguna Laporan Keuangan

26 16. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan
27 keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:

- 28 (a) masyarakat;
- 29 (b) para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- 30 (c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan
31 pinjaman; dan
- 32 (d) pemerintah.

1 Kebutuhan Informasi

2 17. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan
3 umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok
4 pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang
5 untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok
6 pengguna. Namun demikian, berhubung laporan keuangan pemerintah
7 berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka
8 komponen laporan yang disajikan setidaknya-tidaknya mencakup jenis laporan
9 dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan
10 (*statutory reports*). Selain itu, karena pajak merupakan sumber utama
11 pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi
12 kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.

13 18. Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional
14 pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan
15 lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni
16 berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan
17 pada arus kas semata. Namun, apabila terdapat ketentuan perundang-
18 undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan
19 basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian.

20 19. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang
21 tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan
22 informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan
23 perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya,
24 pemerintah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk
25 kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka
26 konseptual ini maupun standar-standar akuntansi yang dinyatakan lebih
27 lanjut.

28 ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN

29 20. Entitas akuntansi adalah setiap unit pemerintahan yang
30 mengelola anggaran, kekayaan, atau kewajiban yang menurut ketentuan
31 peraturan perundang-undangan wajib menyelenggarakan akuntansi dan
32 menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang
33 diselenggarakannya.

34 21. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari
35 satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan
36 perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban
37 kepada legislatif dan/atau publik, berupa laporan keuangan yang bertujuan
38 umum, yang terdiri dari:

- 39 (a) Pemerintah pusat;
- 40 (b) Pemerintah daerah;

- 1 (c) Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan
2 pemerintah pusat;
- 3 (d) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau
4 organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan
5 satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

6 22. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan
7 syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan
8 terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk
9 pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan
10 lainnya.

11 PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

12 Peranan Pelaporan Keuangan

13 23. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang
14 relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh
15 suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan
16 terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang
17 dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan,
18 menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas
19 pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan
20 perundang-undangan.

21 24. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk
22 melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai
23 dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu
24 periode pelaporan untuk kepentingan:

25 (a) Akuntabilitas

26 Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta
27 pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan
28 dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

29 (b) Manajemen

30 Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
31 suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga
32 memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas
33 seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk
34 kepentingan masyarakat.

35 (c) Transparansi

36 Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada
37 masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak
38 untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas

1 pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya
2 yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan
3 perundang-undangan.

4 (d) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

5 Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan
6 pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh
7 pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang
8 diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

9 (e) Evaluasi Kinerja

10 Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan
11 sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai
12 kinerja yang direncanakan.

13 Tujuan Pelaporan Keuangan

14 25. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan
15 informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas
16 dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik
17 dengan:

18 (a) menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan
19 sumber daya keuangan;

20 (b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode
21 berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

22 (c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang
23 digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang
24 telah dicapai;

25 (d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan
26 mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

27 (e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas
28 pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik
29 jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari
30 pungutan pajak dan pinjaman;

31 (f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas
32 pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai
33 akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

34 26. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan
35 menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya
36 keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, saldo anggaran lebih,
37 surplus/defisit-LO, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas
38 pelaporan.

1 KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

2 27. Laporan keuangan pokok terdiri dari:

- 3 (a) Laporan Realisasi Anggaran;
- 4 (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- 5 (c) Neraca;
- 6 (d) Laporan Operasional;
- 7 (e) Laporan Arus Kas;
- 8 (f) Laporan Perubahan Ekuitas;
- 9 (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

10 28. Selain laporan keuangan pokok seperti disebut pada paragraf
11 27, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen
12 informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan
13 (*statutory reports*).

14 DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

15 29. Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan
16 peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah,
17 antara lain:

- 18 (a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang
19 mengatur keuangan negara;
- 20 (b) Undang-undang di bidang keuangan negara;
- 21 (c) Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
22 peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 23 (d) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah
24 daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah;
- 25 (e) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan
26 keuangan pusat dan daerah;
- 27 (f) Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran
28 Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
- 29 (g) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang
30 keuangan pusat dan daerah.

31 ASUMSI DASAR

32 30. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan
33 pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa
34 perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- 1 (a) Asumsi kemandirian entitas;
- 2 (b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
- 3 (c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

4 Kemandirian Entitas

5 31. Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa setiap unit
6 organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban
7 untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar
8 unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi
9 terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun
10 anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas
11 bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca
12 untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau
13 kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi
14 akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah
15 ditetapkan.

16 Kesinambungan Entitas

17 32. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas
18 pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah
19 diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan
20 dalam jangka pendek.

21 Keterukuran dalam Satuan Uang (Monetary 22 Measurement)

23 33. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap
24 kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini
25 diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam
26 akuntansi.

27 KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

28 34. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran
29 normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat
30 memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat
31 normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat
32 memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- 33 (a) Relevan;
- 34 (b) Andal;

- 1 (c) Dapat dibandingkan; dan
2 (d) Dapat dipahami.

3 Relevan

4 35. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi
5 yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna
6 dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini,
7 dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil
8 evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan
9 yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

10 36. Informasi yang relevan :

- 11 (a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

12 Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau
13 mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

- 14 (a) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

15 Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang
16 akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

- 17 (b) Tepat waktu

18 Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan
19 berguna dalam pengambilan keputusan.

- 20 (c) Lengkap

21 Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin,
22 yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi
23 pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir
24 informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan
25 dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut
26 dapat dicegah.

27 Andal

28 37. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang
29 menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur,
30 serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau
31 penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut
32 secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi
33 karakteristik:

- 34 (a) Penyajian Jujur

1 Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa
2 lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat
3 diharapkan untuk disajikan.

4 (b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

5 Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan
6 apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda,
7 hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

8 (c) Netralitas

9 Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada
10 kebutuhan pihak tertentu.

11 Dapat Dibandingkan

12 38. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih
13 berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode
14 sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
15 Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan
16 secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan
17 akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal
18 dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan
19 akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan
20 kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang
21 sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode
22 terjadinya perubahan.

23 Dapat Dipahami

24 39. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat
25 dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang
26 disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna
27 diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan
28 lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna
29 untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

30 PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN 31 KEUANGAN

32 40. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan
33 sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam
34 penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan
35 keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan
36 keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini

- 1 adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan
2 keuangan pemerintah:
- 3 (a) Basis akuntansi;
 - 4 (b) Prinsip nilai historis;
 - 5 (c) Prinsip realisasi;
 - 6 (d) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
 - 7 (e) Prinsip periodisitas;
 - 8 (f) Prinsip konsistensi;
 - 9 (g) Prinsip pengungkapan lengkap; dan
 - 10 (h) Prinsip penyajian wajar.

11 Basis Akuntansi

12 41. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan
13 pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan, beban, aset,
14 kewajiban, dan ekuitas dana. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan
15 disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib
16 menyajikan laporan demikian.

17 42. Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa
18 pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah
19 terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum
20 Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; dan beban diakui pada saat
21 kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah
22 terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum
23 Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak
24 luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

25 43. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis
26 kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan
27 penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas
28 Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer
29 dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening
30 Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun
31 dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka penyajian LRA harus
32 disesuaikan.

33 44. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan
34 ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat
35 kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah,
36 tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1 Nilai Historis (*Historical Cost*)

2 45. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang
3 dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk
4 memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar
5 jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk
6 memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan
7 pemerintah.

8 46. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang
9 lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat
10 nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

11 Realisasi (*Realization*)

12 47. Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang
13 telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi
14 akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode
15 tersebut.

16 48. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against*
17 *revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan
18 sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

19 Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance* 20 *over Form*)

21 49. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar
22 transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau
23 peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi
24 dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila
25 substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek
26 formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam
27 Catatan atas Laporan Keuangan.

28 Periodisitas (*Periodicity*)

29 50. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan
30 perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas
31 dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
32 Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan,
33 triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

1 Konsistensi (*Consistency*)

2 51. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang
3 serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip
4 konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan
5 dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode
6 akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang
7 baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding
8 metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan
9 dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

10 Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

11 52. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang
12 dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna
13 laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*)
14 laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

15 Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

16 53. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi
17 Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan
18 Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas
19 Laporan Keuangan.

20 54. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan
21 diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan
22 tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat
23 serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam
24 penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur
25 kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian
26 sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban
27 tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan
28 pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan
29 cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang
30 terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang
31 terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak
32 andal.

33 KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN 34 ANDAL

35 55. Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah
36 setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal
37 dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan

1 dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan
2 kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi
3 dan laporan keuangan pemerintah, yaitu:

4 (a) Materialitas;

5 (b) Pertimbangan biaya dan manfaat;

6 (c) Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

7 Materialitas

8 56. Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan
9 keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi
10 kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk
11 mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat
12 mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar
13 laporan keuangan.

14 Pertimbangan Biaya dan Manfaat

15 57. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya
16 penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak
17 semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari
18 biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat
19 merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus
20 dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin
21 juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan
22 informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin
23 akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

24 Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

25 58. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk
26 mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan
27 normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah.
28 Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda,
29 terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan
30 antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan
31 profesional.

32 UNSUR LAPORAN KEUANGAN

33 59. Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan
34 pelaksanaan anggaran (*budgetary reports/statutory reports*), laporan finansial,
35 dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri

1 dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Laporan
2 finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
3 Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. CaLK merupakan laporan yang merinci atau
4 menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran
5 maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan
6 dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

7 Laporan Realisasi Anggaran

8 60. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber,
9 alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh
10 pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara
11 anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

12 61. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi
13 Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.
14 Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- 15 (a) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum
16 Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya
17 yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
18 yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu
19 dibayar kembali oleh pemerintah.
- 20 (b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum
21 Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran
22 Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan
23 diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 24 (c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas
25 pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana
26 perimbangan dan dana bagi hasil.
- 27 (d) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang
28 tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar
29 kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
30 bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam
31 penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup
32 defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan
33 antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran
34 pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok
35 pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan
36 modal oleh pemerintah.

1 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

2 62. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan
3 informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan
4 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5 Neraca

6 63. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas
7 pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal
8 tertentu.

9 64. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban,
10 dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- 11 (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
12 pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
13 manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
14 diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat
15 diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang
16 diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
17 sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 18 (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
19 penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
20 pemerintah.
- 21 (c) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan
22 selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

23 Aset

24 65. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset
25 adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung
26 maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran
27 pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

28 66. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu
29 aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat
30 direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua
31 belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan
32 dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

33 67. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka
34 pendek, piutang, dan persediaan.

35 68. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang,
36 dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak
37 langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat

1 umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset
2 tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

3 69. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan
4 dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial
5 dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka
6 panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi
7 nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan
8 modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya.
9 Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi
10 permanen lainnya.

11 70. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
12 bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi
13 dalam pengerjaan.

14 71. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya.
15 Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama
16 (kemitraan).

17 Kewajiban

18 72. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah
19 mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya
20 mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan
21 datang.

22 73. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan
23 tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks
24 pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber
25 pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas
26 pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga
27 terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau
28 dengan pemberi jasa lainnya.

29 74. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai
30 konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-
31 undangan.

32 75. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek
33 dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan
34 kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas
35 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah
36 kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas)
37 bulan sejak tanggal pelaporan.

1 Ekuitas Dana

2 76. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang
3 merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal
4 laporan. Saldo ekuitas dana di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas dana
5 pada Laporan Perubahan Ekuitas

6 Laporan Operasional

7 77. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi
8 yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah
9 pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu
10 periode pelaporan.

11 78. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan
12 Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar
13 biasa. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

14 (a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah
15 nilai kekayaan bersih.

16 (b) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai
17 kekayaan bersih.

18 (c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari
19 oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk
20 dana perimbangan dan dana bagi hasil.

21 (d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang
22 terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi
23 biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar
24 kendali atau pengaruh entitas bersangkutan

25 Laporan Arus Kas

26 79. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan
27 dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan
28 transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,
29 pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode
30 tertentu.

31 80. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari
32 penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai
33 berikut:

34 (a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara
35 Umum Negara/Daerah.

- 1 (b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara
2 Umum Negara/Daerah.

3 Laporan Perubahan Ekuitas

4 81. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau
5 penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
6 sebelumnya.

7 Catatan atas Laporan Keuangan

8 82. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif
9 atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran,
10 Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
11 Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga
12 mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh
13 entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk
14 diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-
15 ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan
16 secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan
17 mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- 18 (a) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan
19 Entitas Akuntansi;
- 20 (b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi
21 makro;
- 22 (c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun
23 pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam
24 pencapaian target;
- 25 (d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan
26 dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas
27 transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 28 (e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan
29 pada lembar muka laporan keuangan;
- 30 (f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar
31 Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka
32 laporan keuangan;
- 33 (g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang
34 wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

1 PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

2 83. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan
3 terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan
4 akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset,
5 kewajiban, ekuitas dana, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan,
6 pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan
7 keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan
8 dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang
9 terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

10 84. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau
11 peristiwa untuk diakui yaitu:

- 12 (a) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan
13 dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau
14 masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
- 15 (b) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang
16 dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

17 85. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa
18 memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

19 Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan 20 Terjadi

21 86. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan
22 besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian
23 derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan
24 dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke
25 entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian
26 lingkungan operasional pemerintah. Pengkajian derajat kepastian yang
27 melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti
28 yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

29 Keandalan Pengukuran

30 87. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang
31 akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya.
32 Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak.
33 Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak
34 mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan
35 pada Catatan atas Laporan Keuangan.

1 88. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi
2 apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi
3 peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

4 Pengakuan Aset

5 89. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan
6 diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat
7 diukur dengan andal.

8 90. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk
9 piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk
10 mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain
11 telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau
12 diestimasi.

13 91. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain
14 bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi,
15 pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain,
16 serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan
17 setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak
18 pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh
19 pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan
20 pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu
21 sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum
22 Negara/Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat
23 ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode
24 akuntansi berjalan.

25 Pengakuan Kewajiban

26 92. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran
27 sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang
28 ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai
29 penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

30 93. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada
31 saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

32 Pengakuan Pendapatan

33 94. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas
34 pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
35 Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum
36 Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.

1 Pengakuan Beban dan Belanja

2 95. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya
3 konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi
4 jasa.

5 96. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari
6 Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus
7 pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada
8 saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang
9 mempunyai fungsi perbendaharaan.

10 PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

11 97. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk
12 mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
13 Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan
14 historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya
15 ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk
16 memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber
17 daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang
18 bersangkutan.

19 98. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata
20 uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi
21 terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

22